**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU ILEGAL FISHING DITINJAU DARI UU
NO. 45 TAHUN 2009**

**Emiel Salim Siregar¹, Zuwairiah Harmika², Angela Eklesia Siagian³, Muhammad Fatwa⁴,
Juliana Mangunsong⁵, Rado Maruli Malau⁶, Hikmah Ramadhani⁷**
emielsalimsrg@gmail.com¹, zuwairiaharmica@gmail.com², angelaeklesia09@gmail.com³,
fatwastr13@gmail.com⁴, julimangunsong3@gmail.com⁵, kucinghitam0904@gmail.com⁶,
hikmahramadhanixiimia@gmail.com⁷
Universitas Asahan

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Analisis normatif dan empiris digunakan dalam metodologi penelitian. Ini mencakup analisis kepustakaan hukum dan data empiris tentang pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak masalah dengan bagaimana menerapkan sanksi pidana ini. Ini termasuk masalah dengan penegakan hukum dan bagaimana membandingkannya dengan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh perburuan ilegal. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sumber daya perikanan Indonesia. Fokus untuk meningkatkan efisiensi penerapan sanksi pidana adalah peningkatan koordinasi lembaga penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penyempurnaan instrumen hukum.

Kata Kunci: Perikanan Ilegal, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Sanksi Pidana, Efektifitas.

Abstract: *The purpose of this study is to assess the efficacy of criminal penalties for engaging in illicit fishing, with a particular emphasis on the regulations outlined in Law Number 45 of 2009 on Fisheries. Both normative and empirical analysis are used in this study, which includes examinations of the legal literature and empirical data about the application of criminal penalties against those who engage in unlawful fishing. The results point to a number of obstacles to the efficacy of these criminal penalties, including comparisons with the financial losses brought about by illicit fishing activities and issues related to law enforcement. It is anticipated that this research will make a substantial contribution to the comprehension and enhancement of laws and policies pertaining to Indonesia's fisheries resource conservation. Improving public awareness, improving law enforcement agency coordination, and improving legal tools are prioritized to bolster the efficacy of the imposition of criminal penalties.*

Kata Kunci: *efficacy, criminal penalties, law number 45 of 2009, unlawful fishing, and fisheries.*

PENDAHULUAN

Sebuah masalah besar yang melibatkan kapal dari negara lain dan kapal dari Indonesia adalah penangkapan ikan yang melanggar hukum di perairan Indonesia. Praktik ini sering melibatkan penggunaan bahan tangkap yang dilarang dan dapat merusak lingkungan laut. Beberapa alat tangkap yang umum digunakan dalam praktik ini termasuk potasium, pukot harimau, dan bahkan bahan peledak (Sodik, 2009, halaman 89). Pemanfaatan alat-alat tersebut melanggar regulasi perikanan dan berdampak negatif pada ekosistem laut dan sumber daya ikan.

Sebagai contoh, pukot harimau adalah alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang dan merusak habitat laut. Selain itu, penggunaan potasium sebagai bahan tambahan dalam proses penangkapan ikan juga merusak makhluk hidup lain dan lingkungan sekitarnya. Penggunaan bahan peledak dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang, mengancam kelangsungan hidup spesies laut, dan menempatkan nelayan yang sah dalam bahaya keamanan.

Untuk menghentikan penangkapan ikan ilegal ini, perlindungan dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan. Selain itu, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan membutuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian sumber daya laut. Oleh karena itu, tindakan konkret harus diambil untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut di wilayah perairan Indonesia dan mengurangi efek negatif dari penangkapan ikan ilegal. Karena mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, kepunahan sumber daya ikan, dan kerugian ekonomi yang signifikan bagi nelayan lokal dan industri perikanan Indonesia, perikanan ilegal sangat merugikan negara (Atmadja, 2017, hlm. 67).

Meskipun UU No. 45 Tahun 2009 telah menetapkan undang-undang yang melarang aktivitas penangkapan ikan ilegal, penegakan hukum terhadap pelaku masih belum memadai. Tidak ada pengawasan laut yang baik, tidak ada kerja sama lintas sektor, dan sedikit efek jera bagi pelaku adalah beberapa penghalang (Nugraha, 2021, hlm. 129). Oleh karena itu, untuk memaksimalkan upaya penanggulangannya, perlu dilakukan penelitian menyeluruh tentang seberapa efektif sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal.

Penelitian sebelumnya tentang masalah perairan ilegal di Indonesia menunjukkan bahwa banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penanggulangannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sodik pada tahun 2009, kurangnya penegakan hukum adalah faktor utama yang menyebabkan banyaknya perairan ilegal. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa sistem penegakan hukum harus diperbarui untuk menangani aktivitas perikanan ilegal.

Selain itu, Atmadja (2017) menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah illegal fishing, diperlukan penguatan kerja sama antar institusi. Kerja sama yang kuat antara berbagai lembaga terkait, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga non-pemerintah, dianggap penting untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung illegal fishing.

Dalam penelitian Wahyono (2020), dia menekankan betapa pentingnya meningkatkan fasilitas patroli dan menggunakan teknologi pengawasan untuk mencegah penangkapan ikan ilegal. Diharapkan bahwa fasilitas patroli yang memadai dan penggunaan teknologi canggih akan meningkatkan pengawasan perairan, sehingga upaya pencegahan penangkapan ikan ilegal dapat dilakukan secara lebih efisien.

Setelah melihat hasil dari ketiga penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa penanggulangan perairan ilegal di Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik. Dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk menanggulangi masalah ini, prioritas utama harus menjadi peningkatan penegakan hukum, kerja sama antar institusi, dan peningkatan infrastruktur patroli dan teknologi pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan penelitian khusus tentang bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal berfungsi untuk mengisi kelangkaan literatur. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan penelitian empiris tentang upaya untuk mencegah penangkapan ikan ilegal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara menyeluruh tentang penerapan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan perdagangan ilegal di Indonesia.

Fokus penelitian adalah aparat penegak hukum yang menangani kasus penangkapan ikan ilegal, yang termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi terkait seperti kementerian kelautan dan perikanan. Selain itu, sumber informasi penting diambil dari akademisi dan pakar hukum kelautan yang memahami masalah ilegal penangkapan ikan. Proses pengumpulan data terdiri dari wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang proses penegakan hukum ilegal penangkapan ikan dan hambatan yang dihadapi, sedangkan studi dokumen bertujuan untuk menganalisis kasus-kasus yang ditangani dan hukuman pidana yang dijatuhkan.

Untuk menganalisis data, model interaktif Miles dan Huberman digunakan, yang terdiri dari reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan diklasifikasikan dan direduksi untuk menemukan tema dan pola yang berhubungan dengan efektivitas penerapan sanksi pidana. Untuk memudahkan analisis, hasil disajikan dalam bentuk naratif dan diagram alur. Hasil dan analisis data digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan sebelum sampai pada kesimpulan.

HADIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyelidikan dokumen kasus yang ditangani dan temuan wawancara dengan penegak hukum menunjukkan bahwa undang-undang No. 45 Tahun 2009 masih belum menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal. Hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian. Beberapa faktor penting berkontribusi pada kelemahan penegakan hukum, terutama dalam kasus penangkapan ikan ilegal. Pertama-tama, kendala utama bagi upaya menegakkan hukum adalah kurangnya bukti dan kesulitan untuk membuktikan kasus. Sifat rahasia atau tersembunyi kegiatan ilegal menyebabkan pengumpulan bukti menjadi sulit.

Kurang koordinasi lintas instansi juga menghambat penanganan kasus penangkapan ikan ilegal. Menurut beberapa penelitian, koordinasi antara instansi terkait masih lemah, seperti yang disebutkan oleh Atmadja, 2017, hlm. 89. Proses penindakan dapat tertunda jika lembaga penegak hukum, pihak berwenang, dan lembaga terkait lainnya tidak bekerja sama dengan baik. Sanksi pidana yang diberikan hakim biasanya tidak memiliki efek jera bagi pelaku (Wahyono, 2020, hlm. 67). Misalnya, denda dianggap terlalu kecil jika dibandingkan dengan uang yang diperoleh dari tangkapan ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian ini, hipotesis yang menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana tidak efektif karena kendala pengawasan, kurangnya koordinasi lembaga, dan rendahnya efek jera adalah benar dan dapat diterima. Penemuan ini sejalan dengan temuan peneliti lain, seperti Sodik (2009), Atmadja (2017), dan Wahyono (2020).

Pertama, hambatan pengawasan sangat penting untuk menentukan seberapa efektif sanksi pidana. Keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan teknologi dapat menghambat kemampuan aparat penegak hukum untuk memantau dan mengawasi. Oleh karena itu, ketidakmampuan untuk memantau secara menyeluruh pelaksanaan sanksi pidana dapat menyebabkan efek deterrensi yang diharapkan menjadi lebih lemah.

Kedua, salah satu alasan mengapa sanksi pidana tidak efektif adalah kurangnya kerja sama antar lembaga. Ketidakepakatan antara lembaga terkait dapat menghambat pelaksanaan sanksi. Selain itu, koordinasi yang buruk dapat menyebabkan upaya diulang atau bahkan tumpang tindih, yang mengganggu kinerja sistem penegakan hukum. Terakhir, pertanyaan penting terkait dengan tujuan utama sanksi pidana muncul karena sanksi pidana tidak memiliki efek jera yang memadai. Jika ini terjadi, tujuan rehabilitasi dan pencegahan tindak kriminal akan terancam. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi ulang prosedur dan strategi penerapan sanksi pidana agar sesuai dengan tujuan pemberian hukuman.

Ada kemungkinan investasi yang lebih besar dalam teknologi, pelatihan penegak hukum yang lebih baik, dan infrastruktur pendukung akan membantu meningkatkan pengawasan. Dengan

membangun mekanisme komunikasi yang lebih baik dan berbagi data secara teratur, peningkatan koordinasi antarlembaga dapat dicapai. Evaluasi menyeluruh dari sistem penegakan hukum dan praktik rehabilitasi juga dapat membantu meningkatkan sanksi pidana secara keseluruhan. Diharapkan penegakan hukum dapat bekerja lebih baik dan memiliki dampak yang lebih besar dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran. Dalam upaya untuk menghentikan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia, masalah serupa telah ditemukan dalam penelitian tersebut. Di antara masalah yang dihadapi adalah penggunaan alat tangkap yang dilarang dan pelanggaran undang-undang perikanan. Ini menunjukkan masalah besar dalam manajemen sumber daya perikanan negara ini.

Perlu dicatat bahwa, meskipun banyak kasus penangkapan ikan ilegal telah ditemukan, beberapa masalah telah menyulitkan proses hukum yang efektif terhadap pelaku kejahatan ini. Banyak kasus hanya sampai tahap penyidikan sebelum sampai ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum harus diperkuat segera dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa pelanggaran regulasi perikanan dibawa ke pengadilan dan diberi sanksi yang layak.

Mengingat kegiatan penangkapan ikan ilegal sering melibatkan pihak asing dan dapat melintasi batas-batas perairan, kolaborasi lintas sektor dan penguatan kerjasama regional juga sangat penting dalam menangani masalah ini. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang masalah ini dan tindakan kolaboratif antarpihak yang terlibat merupakan langkah-langkah penting untuk merespons secara efektif masalah penangkapan ikan ilegal di Indonesia. Kegagalan sistem penegakan hukum ini memungkinkan pelaku penangkapan ikan ilegal untuk menghindari hukuman.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidikan, pengumpulan bukti yang lebih efektif, dan koordinasi lintas instansi yang lebih baik adalah langkah-langkah penting untuk memperkuat penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan kasus ilegal fishing dan untuk memastikan bahwa pelaku ilegal fishing benar-benar diadili dan menerima hukuman yang pantas sesuai dengan undang-undang yang berlaku, lembaga pemerintah, penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait harus bekerja sama. Akibatnya, diperlukan tindakan yang direncanakan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

Dalam hal kebijakan, koordinasi lebih erat antara lembaga terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan kementerian kelautan dan perikanan diperlukan. Untuk menjangkau jaringan pelaku penangkapan ikan ilegal yang tersebar di seluruh dunia, sangat penting untuk bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Interpol. Sementara itu, untuk mengatasi kendala minimnya bukti, anggaran untuk pengadaan teknologi pemantauan dan sarana patroli harus ditingkatkan (Wahyono, 2020, hlm. 189). Agar penyidikan dan penuntutan kasus dapat dilakukan secara profesional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga diperlukan.

Terakhir, ketentuan dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 harus diubah untuk mengatasi masalah perdagangan ikan ilegal. Perubahan ini dibuat untuk memastikan bahwa sanksi memiliki efek yang lebih jera terhadap pelaku kejahatan. Peningkatan denda, perpanjangan masa penjara, dan penerapan sanksi tambahan seperti perampasan alat tangkap dan barang tangkapan hasil ilegal adalah beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan.

Denda yang lebih tinggi dapat membantu mengurangi keinginan finansial untuk melakukan aktivitas ilegal, sementara perpanjangan masa penjara dapat memberikan efek jera dan mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum di masa mendatang. Sanksi tambahan, seperti perampasan alat tangkap dan barang tangkapan ilegal, dapat digunakan sebagai hukuman ekonomi tambahan dan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan pada ekosistem laut.

Tidak hanya penting untuk merevisi ketentuan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara teratur dan efektif. Ini termasuk lembaga penegak hukum yang lebih terlibat, peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perikanan, dan kerja sama lintas sektor yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perubahan regulasi dapat membantu penegakan hukum terhadap perdagangan ikan ilegal di Indonesia.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa UU No. 45 Tahun 2009 belum menerapkan sanksi pidana

terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal di Indonesia. Ini disebabkan oleh pengawasan dan pembuktian kasus yang buruk, koordinasi antar lembaga yang buruk, dan sanksi yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, lebih banyak kerja sama lintas sektoral dan internasional, dan penyesuaian undang-undang pidana untuk lebih memberatkan pelaku. Oleh karena itu, tujuan awal penelitian ini mengkaji seberapa efektif sanksi pidana yang diterapkan terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal di Indonesia telah tercapai. Penelitian ini akan membantu pemerintah dan aparat penegak hukum terkait memperbaiki sistem penindakan tindak pidana perikanan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, S.B. (2017). Strategi Penguatan Kerjasama Antar Institusi dalam Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 9(2), 65-89.
- Nugraha, B. (2021). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Illegal Fishing di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 11(2), 125-135.
- Sodik, D.M. (2009). Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Illegal Fishing di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 21(1), 85-98.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Wahyono, B. (2020). Meningkatkan Pengawasan dan Patroli untuk Pencegahan Illegal Fishing di Indonesia. *Indonesian Journal of Marine Affairs*, 5(2), 167-198.